



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
KE PROVINSI PAPUA BARAT
MASA RESES PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2017-2018
TANGGAL 12 DESEMBER 2017

I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

II
II
I
I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
KE PROVINSI PAPUA BARAT
MASA RESES PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2017-2018
TANGGAL 12 DESEMBER 2017**

.....
I. PENDAHULUAN

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ini berjumlah 13 orang. Selain itu, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh 3 (tiga) orang staf (sestim) dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) orang Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) orang reporter dari Lembaga Pemberitaan (TV Parlemen) DPR RI.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

1. Pertemuan dilaksanakan di Aula Provinsi Papua Barat yang dihadiri oleh Gubernur Papua Barat beserta jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat, Ketua KPU Provinsi Papua Barat dan jajarannya, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat dan jajarannya, Kepala Kanwil BPN Papua Barat dan jajarannya, serta Kepala ORI Perwakilan Provinsi Papua Barat dan jajarannya.
2. Beberapa permasalahan yang diajukan oleh Tim Kunjungan Komisi II dalam bentuk pertanyaan tertulis dijawab secara tertulis oleh Gubernur Papua Barat beserta jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, Ketua KPU Provinsi Papua Barat dan jajarannya, serta Kepala Kanwil BPN Papua Barat dan jajarannya sebagaimana terlampir. Adapun Kepala ORI Perwakilan Provinsi Papua Barat,

DPRD Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Provinsi Papua Barat tidak memberikan jawabannya secara tertulis.

3. Adapun beberapa permasalahan lain yang muncul dari dialog interaktif adalah:

- a. Pemerintah Provinsi Papua Barat berjalan/bekerja sejak Mei 2017
- b. Papua dan Papua Barat memiliki perbedaan dengan daerah lainnya, terutama terkait keberadaan suku
- c. e-KTP bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan demokrasi, namun banyak masalah dimulai blanko tidak ada, alat perekam rusak, SDM tidak ada dsb.
- d. Kondisi geografis, kesadaran masyarakat, dan kekurangan transportasi menjadi penghambat pelaksanaan e-KTP, oleh karenanya perlu ada penambahan anggaran, penambahan alat transportasi dan pendukung lainnya.
- e. Persoalan e-KTP di Papua Barat masih sangat rentan dan rawan, e-KTP di Papua Barat baru 20%, itu pun paling banyak adalah Suket. Oleh karenanya untuk Pemilu mendatang sebaiknya untuk Papua Barat sebaiknya menggunakan KTP Nasional.
- f. Pilkada di Papua Barat telah diselesaikan pada gelombang 1 dan 2, saat ini dalam persiapan pemilu. Dapil di Papua Barat tidak berubah, masih sama dengan pemilu 2014.
- g. perlu ada revisi UU Pemilu, terutama pada pasal 7, awalnya Papua Barat 5 penyelenggara saja sudah sulit, sekarang menjadi 3 penyelenggara, semakin sulit. Saya sudah sampaikan kepada Mendagri, alasannya adalah efisiensi. Seharusnya tidak demikian, untuk pelaksanaan demokrasi berapapun harus dibayar. Asas penyelenggara, terutama keadilan belum tercermin, seharusnya aspek tingkat kesulitan dan kondisi daerah harus diperhatikan.
- h. DOB di Papua Barat yang telah diusulkan dan sudah mendapat ampres agar diproses lebih lanjut, baik kab/kota maupun Provinsi Papua Barat Daya.
- i. Saat ini sedang menyusun SOP Pelayanan Publik karena s/d saat ini belum ada, penggunaan teknologi informasi sesuai intruksi presiden setiap OPD harus memiliki layanan pengaduan, s/d saat ini blm berjalan.
- j. Pembangunan Desa sudah semakin baik sejak ada UU Desa, termasuk di Papua Barat, sejak 2015 terjadi penambahan kampung dan 2017 anggaran

semakin besar, di distribusikan ke 12 kab/kota yang terbagi dalam distrik dan kampung.

- k. selalu mengalami keterlambatan, sebab selalu terkendala dengan persyaratan, tenaga pendamping tidak melaksanakan dengan baik. Terdapat 1873 kampung sasaran dana desa, sementara tenaga pendamping hanya ada 873, tentu sangat tidak ideal. Oleh karenanya agar tunjangan tenaga pendamping agar dinaikan serta tenaga pendamping lokal desa, agar proses pendaftaran di kab/kota saja, lebih efisien dan efektif.
- l. aparat keamanan dan kepolisian membuat kepala kampung panik dalam menggunakan dana Desa
- m. permasalahan lainnya sebagaimana terlampir dalam jawaban tertulis Gubernur Papua Barat, KPU Provinsi Papua Barat dan Kanwil BPN Papua Barat.

III. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat, KPU Provinsi Papua Barat dan Kanwil BPN Papua Barat atas partisipasi aktif memberikan informasi atas beberapa pertanyaan, hal ini berguna sebagai bahan dan masukan kepada Komisi II DPR RI.
2. Komisi II DPR RI menilai secara umum, masih terdapat permasalahan yang cukup serius dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Tenaga Honorer, Pertanahan dan Tata Ruang, Pelaksanaan e-KTP, Pelaksanaan UU tentang Desa di Papua Barat.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diuraikan dan dilampirkan. Semoga bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, serta kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini kami ucapkan terimakasih.